

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN KEMISKINAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

Nama : Dico Primadha Santosa
NPM : 1611021069



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAC

THE EFFECT OF HEALTH, EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH ON POVERTY LEVELS IN LAMPUNG PROVINCE FOR THE PERIOD OF 2015-2019

**By
Dico Primadha Santosa**

This research is a study that aims to determine whether the variables of local government size, intergovernmental revenue and poverty simultaneously or partially affect economic growth in Lampung Province. The population in this study were districts / cities in Lampung Province, amounting to 15 districts / cities, all districts and cities were sampled. The results of the study using panel data regression, concluded that together the size of local government, intergovernmental revenue and poverty affect economic growth, in addition, partially proves that the size of local government has a positive and significant influence on economic growth, and intergovernmental revenue and poverty variables have a negative and statistically significant effect on economic growth in the districts/cities of Lampung Province in 2015 – 2019.

**Keywords: Size of Local Government, Intergovernmental Revenue, Poverty,
Economic Growth.**

ABSTRAK

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Dan Kemiskinan Terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)

Oleh
Dico Primadha Santosa

Penelitian ini merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Populasi dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 15 Kabupaten/Kota, seluruh kabupaten dan kota menjadi sampel. Hasil penelitian menggunakan regresi data panel, menyimpulkan bahwa secara bersama-sama ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu, secara parsial membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan variabel *intergovernmental revenue* dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Kemiskinan.

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN KEMISKINAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

DICO PRIMADHA SANTOSA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Proposal Skripsi : **PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN
KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH**

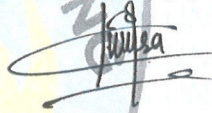
Nama Mahasiswa : **Dico Primadha Santosa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1611021069**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

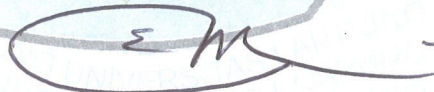
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022
Yang Mengajukan,



Dico Primadha Santosa
NPM 1611021069

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Dr. Marselina S.E., M.P.M.
NIP 19670710 199003 2 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

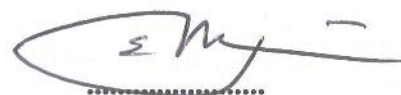


Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 1963 215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr.Marselina S.E., M.P.M.



Penguji I : Emi Maimunah, S.E., M.Si.



Penguji II : Asih Murwiati, S.E., M.E.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022



Dico Primadha Santosa

RIWAYAT HIDUP



Dico Primadha Santosa., Lahir pada tanggal 07 Maret 1998, di Bandar Lampung Provinsi Bandar Lampung. Penulis merupakan Anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan Prihatin Santosa dan Yernida Kh.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 1 Tanjung Gading Bandar Lampung pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 9 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMK Negeri 4 Bandar Lampung , dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubahkeadaan diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11).¹

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi orang yang anda inginkan”

(George Eliot)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Prihatin Santosa dan Ibu Yernida KH yang telah memberikan seluruh kekuatan penuh cinta, kasih sayang, ketulusan dan dukungan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Abang ku Septian priwo habdiyanto dan Adik-adikku Dea Ananda Fitri dan Dinda Pridania Santosa yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta dukungan tiada henti disetiap prosesnya.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu kebersamai dan memberikan dukungan di setiap perjuangannya.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat serta nasihat yang sangat membantu dan membangun almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Dan Kemiskinan Terhadap pertumbuhan ekonomi daerah” (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung) sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Asih Murwiati S.E., M.E.. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Arivina Ratih yulihar Taher S.E., M.M. selaku Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
8. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, nasihat, dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Seluruh Karyawan/Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Prihatin Santosa dan Yernidha yang selalu memberikan kekuatan, cinta, kasih sayang, doa, dukungan yang tulus, ikhlas dan selalu tercurahkan disepanjang jalanku serta kerja keras yang tak kenal lelah. Terima kasih yang tak terhingga untuk segalanya.
12. kakak dan Adik-adikku, septiyan, dinda, dea terimakasih atas dukungan dan doa yang tulus untuk keberhasilanku.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan, Cindy, Aji, Lia, Dicky, Ewok pemberi semangat, doa dan warna-warni dikehidupanku semoga kita selalu bersama.
14. Sahabat serta partner bisnis, Bimbim, po, surya, dohan, yang selalu menemani, menyemangati, dan mendoakan yang terbaik.
15. wanitaku Corry anasthasya Terimakasih atas doa dan dukungan yang tulus selama ini .
16. Sahabat-sahabat kontrakan, ferly, herdy butoi, yurnedi, suttan, yang selalu memberi kebahagiaan serta tawa.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022
Penulis



Dico Primadha Santosa
NPM 1611021069

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	1
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	15
A. Peran Pemerintah.....	15
B. Tinjauan Tentang Pertumbuhan Ekonomi.....	17
C. Pengertian Ukuran (<i>Size</i>) Pemerintah Daerah	23
D. Tinjauan Tentang <i>Intergovernmental Revenue</i>	26
E. Tinjauan Tentang Kemiskinan	30
F. Hubungan Antar Variabel	38
G. Penelitian Terdahulu	40
H. Kerangka Pemikiran	42
I. Hipotesis.....	44
III. METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Populasi dan Sampel Penelitian	46
D. Definisi Operasional Variabel	46
1. Pertumbuhan Ekonomi	46
2. Ukuran Pemerintah Daerah	47
3. <i>Intergovernmental Revenue</i>	47
4. Kemiskinan.....	48
E. Model Penelitian	48
F. Metode Analisis.....	49

G. Regresi Data Panel	49
H. Penentuan Metode Estimasi	52
1. Uji Chow	52
2. Uji Hausman	53
3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (L-M)	54
I. Pengujian Hipotesis	54
1. Uji t-Statistik	54
2. Uji F.....	55
J. Koefisien Determinasi (R^2)	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	57
1. Pertumbuhan Ekonomi (PE).....	57
2. Ukuran Pemerintah Daerah (UPD).....	58
3. <i>Intergovernmental Revenue</i> (IRV)	59
4. Kemiskinan.....	60
B. Uji Regresi Data Panel	61
C. Uji Asumsi Klasik	65
D. Pengujian Hipotesis	68
1. Uji t-Statistik	69
2. Uji F.....	71
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
E. Pembahasan.....	72
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	89

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (Dalam Persen).....	4
Tabel 1.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	5
Tabel 1.3. Ukuran Pemerintah Daerah menurut Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (Dalam juta Rupiah).....	6
Tabel 1.4. Rata-rata Intergovernmental Revenue di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015-2019.....	9
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1. Nama Variabel, Simbol, Periode Waktu, Satuan Pengukuran dan Sumber Data	48
Tabel 4. 1. Deskripsi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019	58
Tabel 4. 2. Deskripsi Variabel Ukuran Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019.....	59
Tabel 4. 3. Deskripsi Variabel Intergovernmental Revenue Tahun 2015-2019	60
Tabel 4. 4. Deskripsi Variabel Tingkat Kemiskinan Tahun 2015-2019.....	61
Tabel 4. 5. Hasil Uji Chow	62
Tabel 4. 6. Hasil Uji Hausman	63
Tabel 4. 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier	64
Tabel 4. 8. Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Metode Pooled Least Square	65
Tabel 4. 9. Hasil Uji Heteroskedastik.....	67
Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi.....	67
Tabel 4. 11. Hasil Uji Parsial (Uji t-Statistik)	69
Tabel 4. 12. Hasil Uji F-Statistik.....	71

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	3
Gambar 1.2. Perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan ukuran pemerintah daerah Provinsi Lampung 2015-2019	7
Gambar 1.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung	11
Gambar 1.4. Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (%) Tahun 2015-2019	12
Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>The Vicious Circle of Poverty</i>)	35
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian	44
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas	66

I. PENDAHULUAN

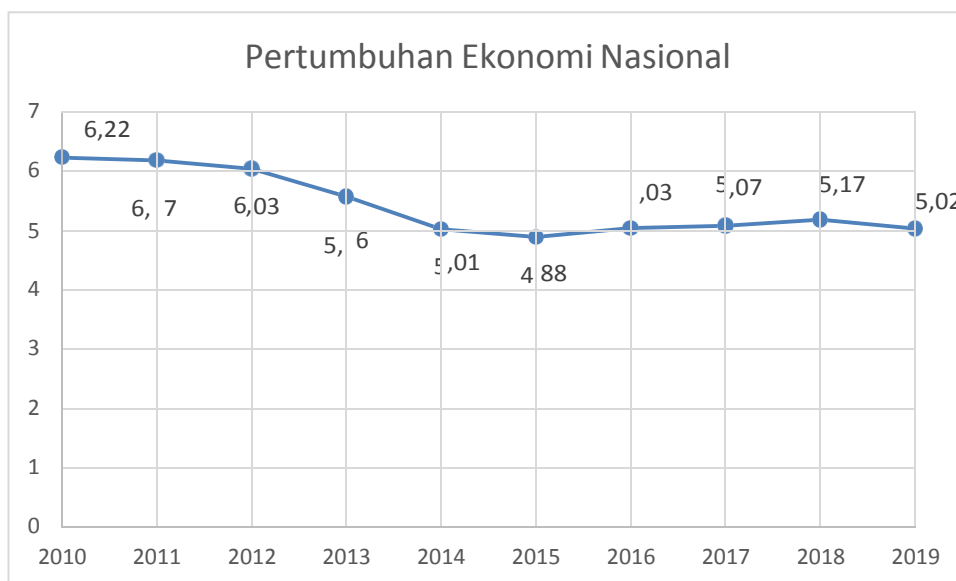
A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat pula meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau

pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2012).

Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan ini pemerintah harus ikut campur tangan secara cepat untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Keynes dalam Ningsih dan Dwi (2019) pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian dan perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes dalam Ningsih dan Dwi (2019) berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Berikut data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB):



Sumber: BPS, Juli 2020

Gambar 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%).

Grafik diatas memperlihatkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2019 positif dan landai. Corak pertumbuhan ekonomi pada periode relatif pertumbuhannya tidak banyak berubah dari tahun ketahun. Tren pertumbuhan ekonominya dapat dikatakan landai. Secara rata-rata data pertumbuhan ekonomi periode ini yaitu sebesar 5.03. Selama 5 tahun, besaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu jauh dari angka tersebut. Data pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 4,88 persen pada tahun 2015. Sedangkan data pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,17 pada tahun 2018. Meskipun dapat dikatakan tidak terlalu berfluktuatif, Angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2019 sebesar 5,29 persen.

Secara umum, pada periode 2015 s/d 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung mengalami penurunan. Berikut data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

Tabel 1. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	rata-rata
Lampung Barat	5,29	5,01	5,03	5,14	5,20	5,13
Tanggamus	5,5	5,18	5,21	5,02	5,03	5,19
Lampung Selatan	5,37	5,22	5,46	5,26	5,14	5,29
Lampung Timur	4,6	4,20	4,64	3,78	3,85	4,21
Lampung Tengah	5,38	5,61	5,29	5,42	5,46	5,43
Lampung Utara	5,43	5,12	5,21	5,33	5,36	5,29
Way Kanan	5,27	5,14	5,11	5,21	5,19	5,18
Tulang Bawang	5,02	5,42	5,45	5,49	5,48	5,37
Pesawaran	5,11	5,07	5,10	5,09	5,02	5,08
Pringsewu	5,22	5,04	5,00	5,31	5,06	5,13
Mesuji	5,23	5,10	5,20	5,31	5,29	5,23
Tulang Bawang Barat	5,35	5,38	5,64	5,46	5,38	5,44
Pesisir Barat	4,93	5,31	5,34	5,35	5,39	5,26
Bandar Lampung	6,32	6,43	6,28	6,21	6,24	6,30
Metro	6,21	5,90	5,66	5,69	5,61	5,81
rata-rata	5,35	5,28	5,31	5,27	5,25	5,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah 2021.

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai 5,29%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dimiliki Bandar Lampung sebesar 6,30%, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah berada di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,21%. Pada tahun 2015 tercatat laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sebesar 6,32 lalu laju pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 0,11 persen menjadi 6,43 persen lalu pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 0,15 persen menjadi 6,28 persen lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,07 persen menjadi 6,21 dan tahun 2019 mengalami pemulihan sebesar 0,03 persen sehingga menjadi 6,24 persen. Provinsi Lampung yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel

perbandingan pertumbuhan ekonomi Lampung dengan pertumbuhan ekonomi Nasional:

Tabel 1.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pertumbuhan Ekonomi Lampung
2015	4,88	5,35
2016	5,03	5,28
2017	5,07	5,31
2018	5,17	5,27
2019	5,02	5,25

Sumber: diolah 2021.

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Lampung di atas pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun dapat dikatakan tidak terlalu berfluktuatif, pada pertumbuhan ekonomi nasional Angka pada tahun 2019 yaitu 5,02% masih di bawah pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2019 sebesar 5,25% . Hal ini dapat dikatakan menarik, untuk itu perlu diketahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pemerintah daerah. Aziz (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam meningkatkan perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Aziz, 2016).

Dapat dikatakan ukuran pemerintah adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran daerah diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dengan dukungan dari aset yang ada, sehingga kinerja pemerintah juga akan meningkat dikarenakan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki pemerintah memadai.

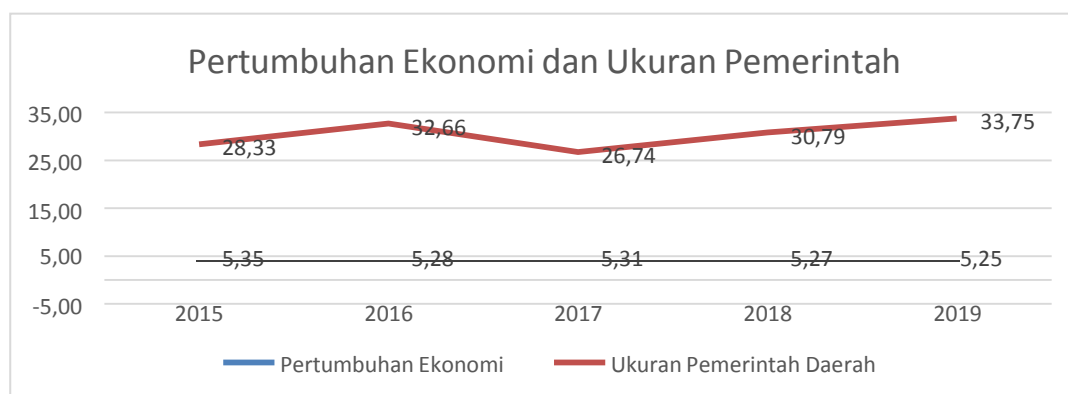
Ukuran pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan kekayaan pemerintah daerah sehingga semakin besar kekayaan yang diukur dengan aset daerah semakin besar pula ukuran pemerintah daerahnya (Kuncahyono, 2015). Begitu juga sebaliknya, semakin kecil total aset maka semakin kecil pula ukuran pemerintah daerahnya. Berikut data yang menunjukkan ukuran pemerintah yang diukur dengan total aset di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

Tabel 1.3. Ukuran Pemerintah Daerah menurut Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (Dalam juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	1.892.836	2.234.463	1.583.391	1.824.476	1.968.113
Tanggamus	1.777.137	2.107.992	1.856.295	2.068.271	2.033.834
Lampung Selatan	2.387.170	2.467.308	2.162.722	2.860.289	3.260.945
Lampung Timur	2.233.633	2.501.286	1.469.297	1.870.410	2.403.693
Lampung Tengah	2.888.237	3.325.423	2.338.382	2.965.755	3.056.191
Lampung Utara	2.559.378	2.917.471	2.056.322	2.288.969	2.768.606
Way Kanan	2.281.986	2.557.017	1.780.436	1.942.040	2.127.792
Tulang Bawang	2.779.005	2.374.721	2.027.976	1.642.128	2.047.075
Pesawaran	954.372	1.475.758	1.470.725	1.787.319	1.944.511
Pringsewu	1.182.752	1.357.981	1.469.333	1.730.094	1.980.316
Mesuji	658.015	1.128.641	1.156.555	1.334.001	1.315.060
Tulang Bawang Barat	714.814	1.260.530	1.343.597	1.578.867	1.765.752
Pesisir Barat	788.113	1.043.812	1.074.319	1.077.238	1.011.391
Bandar Lampung	3.157.835	3.696.281	3.269.588	3.903.967	4.054.683
Metro	2.069.859	2.211.633	1.677.266	1.912.023	2.013.706
Jumlah	28.325.144	32.660.317	26.736.204	30.785.844	33.751.665

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, diolah 2021.

Dari Tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki ukuran pemerintah terbesar dibandingkan dengan kabupaten di Provinsi Lampung lainnya. Hal tersebut terlihat dari aset daerah pada Tahun 2019 sebesar 4.054.683(dalam juta rupiah). Dengan kata lain, semakin besar ukuran pemerintah daerah secara tidak langsung kekayaan dan sumber daya manusia yang dimiliki akan semakin besar pula, apabila pemerintah mampu memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber potensi daerahnya serta mampu mengelola dengan baik seluruh potensi-potensi daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomiannya, yang berarti jika ukuran pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin besar pula tuntutan terhadap pemerintah dalam peningkatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung dengan ukuran pemerintah daerah di provinsi lampung yang digambarkan dengan kurva pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah 2021

Gambar1.2. Perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan ukuran pemerintah daerah Provinsi Lampung 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa garis yang ditunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan ukuran pemerintah daerah mempunyai sedikit kesamaan perkembangan, hal ini menyatakan bahwa jika ukuran pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Selain itu, Chau (2001:29) berpendapat bahwa semakin besar ukuran pemerintah, maka akan semakin besar pasar bebas yang ada, pasar bebas akan senantiasa mampu mengimbangi kelangkaan sumberdaya yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan populasi. Kelangkaan itu akan memacu harga dan sekaligus akan perlunya pengembangan teknologi-teknologi produksi baru yang hemat biaya. Pada akhirnya, pasar bebas dan kemurnian ide manusia mampu mengatasi setiap persoalan dan kesulitan sehingga akan meningkatkan perekonomian. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramayandi (2003) serta Manik (2013) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya, tekanan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan perekonomian.

Selain ukuran pemerintah, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah *Intergovernmental Revenue* atau biasa dikenal dengan dana perimbangan. Minarsih (2015) mengungkapkan bahwa, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari *intergovernmental revenue* menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara

Pemerintahan Daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Salah satu sumber dana ini adalah dari pajak. Melihat hal ini, kepatuhan pajak masyarakat sangat memengaruhi besaran dana yang dialokasikan untuk Pemerintah dan Daerah, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Lampung. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, 2021). Berikut data yang menunjukkan rata-rata *Intergovernmental Revenue* yang diukur dengan dana perimbangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dalam ribuan rupiah:

Tabel 1.4. Rata-rata Intergovernmental Revenue di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan (Juta Rp)					rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
Lampung Barat	639.899	826.678	773.065	854.831	791.713	777.237
Tanggamus	880.574	1.136.754	1.130.002	1.073.484	1.131.249	1.070.413
Lampung Selatan	1.024.585	1.372.433	1.286.923	1.407.455	1.412.941	1.300.867
Lampung Timur	1.164.855	1.555.333	1.489.413	1.494.906	1.475.128	1.435.927
Lampung Tengah	1.377.672	1.825.749	1.722.466	1.847.859	1.797.258	1.714.201
Lampung Utara	989.119	1.238.245	1.246.230	1.206.060	1.244.667	1.184.864
Way Kanan	780.634	908.456	1.034.485	1.023.174	990.355	947.421
Tulang Bawang	748.925	861.647	825.408	903.489	823.127	832.519
Pesawaran	703.319	903.422	930.163	844.615	895.181	855.340
Pringsewu	738.758	915.046	860.970	842.346	459.198	763.264
Mesuji	532.041	553.241	577.753	615.641	632.875	582.310
Tulang Bawang Barat	639.751	715.824	670.846	725.407	661.079	682.581
Pesisir Barat	435.163	594.201	596.175	573.284	573.654	554.495
Bandar Lampung	1.016.423	137.176	1.408.084	1.364.968	1.400.623	1.065.455
Metro	494.177	683.789	680.267	624.067	641.899	624.840

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diolah 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2019 mencatat, rata-rata *intergovernmental revenue* yang diukur dengan dana perimbangan terbesar kembali dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.1714200,87, dan terendah dimiliki oleh Kabupaten pesisir barat sebesar Rp.

554495,41, terjadi perbedaan jumlah *intergovernmental revenue* tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Salah satunya adalah kekuatan infrastruktur penunjang perekonomian daerah tidak tersebar merata di setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, tujuan utama pemberian dana peimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*). Dengan adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah, Dana perimbangan dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki perekonomian yang baik. Hasil penelitian Ningsih (2019) serta Chandra (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan ternyata berdampak baik dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2017).

Secara umum, pada periode Maret 2014 s/d Maret 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase yang dapat dilihat pada grafik berikut:



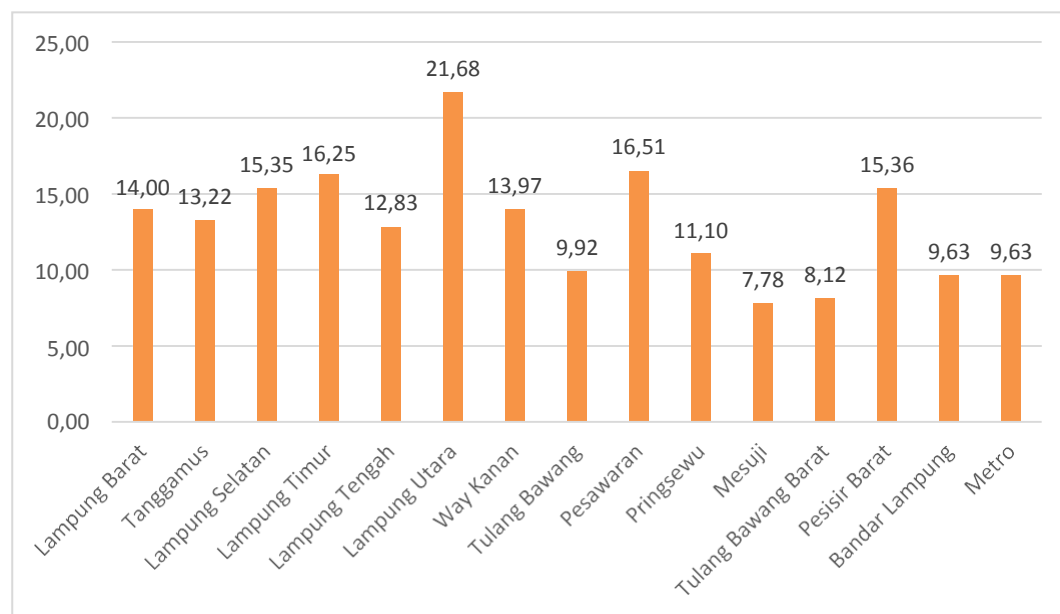
Sumber: *Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Gambar 1.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung 2014-2019

Pada gambar diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, hal ini diduga karena menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2018, penduduk Lampung berjumlah 8.370.485 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut menyebabkan Provinsi Lampung tidak terlepas dari masalah sosial seperti kemiskinan. Data terakhir memperlihatkan tingkat kemiskinan di Lampung sebesar 12,62%, data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Lampung berada di atas angka kemiskinan Nasional. Berdasarkan data BPS, persentase angka kemiskinan periode September 2019-Maret 2019 mencapai 9,41 persen atau sebesar 26,42 juta jiwa.

Hal ini tentu saja dapat menciptakan ketidakadilan dan penderitaan untuk masyarakat yang menjadi buruh. Mereka bekerja keras dengan waktu yang lama, tetapi mereka mendapatkan upah yang minimal, sedangkan banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh pendapatan yang rendah akibat rendahnya produktifitas dan keterampilan, sarana produksi yang

digunakan masih sederhana, pendidikan rendah, tanggungan keluarga tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi dan rendahnya tabungan. Dengan demikian fenomena kemiskinan ini merupakan suatu lingkaran setan yang tidak berujung pangkal dan apabila tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan penyakit ekonomi yang menyengsarakan masyarakat (Silatri, 2016). Berikut disajikan data persentase penduduk miskin setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2015 sampai tahun 2019:



Sumber: Data diolah BPS, 2021.

Gambar 1.4. Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (%) Tahun 2015-2019

Terlihat pada Gambar 1.4. bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi dengan nilai 21,68%, sedangkan untuk Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Lampung dimiliki oleh Kabupaten Mesuji dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,78%. Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan

pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut Tambunan (2014) pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Pada akhirnya kemiskinan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, hal ini jelas mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah, sejalan dengan hasil penelitian Aryunah dkk (2015) dan Novriansyah (2018) yang membuktikan bahwa secara parsial kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Lampung secara administratif dibagi menjadi 2 Kota dan 13 Kabupaten tentunya diperhadapkan dengan masalah kemiskinan, yang merupakan masalah pembangunan yang umum dihadapi oleh setiap daerah. Kondisi kependudukan daerah menunjukkan bahwa jumlah penduduk di tiap tiap Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung bervariasi antara satu dengan lainnya. Hal ini membuat peneliti termotivasi untuk menguji kembali pengaruh ukuran pemerintah daerah,

intergovernmental revenue dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Atas dasar inilah penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

2. Untuk menganalisis pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual (*intellectual exercise*) yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin yang digeluti.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangannya ilmu khususnya tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut,

masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak social tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Suwadi, 2014). Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2005) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

1. *Pertama*, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. *Kedua*, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. *Ketiga*, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. *Keempat*, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

5. *Kelima*, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. *Keenam*, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. *Ketujuh*, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2005), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pertumbuhan Ekonomi

Banyak para ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyelidikan yang telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi menurut para ahli:

Menurut Sukirno (2012) Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Arsyad (2015) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak. Menurut Mankiw (2007) PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain melihat PDB adalah sebagai pengeluarantotal atas *output* barang dan jasa perekonomian.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari kenaikan PDB atau PNB dalam jangka panjang tanpa memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi.

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Dalam analisis ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam suatu

perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Investasi perusahaan-perusahaan
- c. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah
- d. ekspor

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*Added Value*) yang terjadi di daerah tersebut. Pertambahan tersebut di ukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Berkaitan dengan pembangunan daerah ada tiga pengertian tentang definisi daerah. Pengertian pertama daerah homogen (*homogenous region*) yaitu menganggap suatu daerah sebagai space atau ruang dimana kegiatan ekonomi berlaku dan diberbagai pelosokruang tersebut sifat-sifatnya sama. Misalnya dari aspek geografis, etnik, ataupun aspek ekonomi. Pengertian kedua adalah daerah modal yaitu daerah sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Pengertian ketiga daerah administrasi yaitu daerah yang memiliki dan memberikan batasan suatu daerahnya dengan batasan administrasi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber-sumber dana yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Arsyad, 2015).

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah (Todaro & Smith, 2011):

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuain teknologi, instusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Definisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan suatu bangsa terlihat meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang, kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, ketiga penggunaan teknologi secara luas dan efesien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Todaro & Smith, 2003).

Pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat dan tingkat pengangguran yang menurun dapat meningkatkan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan.

Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung. Sukirno (2012) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah dan Kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang ada. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor utama (pertanian dan pertambangan).

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak penduduk maka akan meningkatkan tenaga kerja. Disamping itu sebagai akibat dari pendidikan, latihan dan pengalaman kerja penduduk akan semakin bertambah, maka produktivitas akan meningkat. Namun luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bergantung pada banyaknya pengusaha dalam ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan semakin tingginya jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal dan teknologi penting dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dengan adanya kemajuan teknologi akan mempertinggi keefisienan kegiatan produksi, menimbulkan barang-barang baru dan meningkatkan mutu barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Dalam negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas tinggi. Sikap masyarakat juga menentukan sampai mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sikap masyarakat yang memberi dorongan terhadap pertumbuhan antara lain sikap berhemat untuk berinvestasi, sikap menghargai kerja keras, dan kegiatan lain untuk mengembangkan usaha.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan perkapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk dari suatu negara pada masa tertentu. Nilainya dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Teori Keynes mengemukakan ada faktor baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi GDP. GDP terbentuk dari empat faktor yang secara positif

mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor neto (NX).

GDP tidak hanya mencerminkan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi suatu negara saja, tetapi juga GDP mencerminkan kesejahteraan penduduk pada suatu negara. GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata-rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata-rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata penduduk, namun di belakang rata-rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang-orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan (Mankiw, 2007).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GDP berhubungan erat dengan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Hadi (2009), bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP).

C. Pengertian Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), ukuran adalah panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Patrick (2007) dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011)

menyatakan bahwa “ukuran daerah adalah salah satu elemen dari struktur organisasi dan prediktor signifikan untuk kepatuhan”. Nasser (2009) dalam Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa “*size* adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu”. Jadi dapat disimpulkan Ukuran merupakan bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda seperti panjang, lebar, luas, dan besar. Pada sektor swasta, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset, nilai penjualan, atau kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan yang diukur menggunakan total aset akan lebih baik karena relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur ukuran perusahaan (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Penelitian serupa dilakukan oleh Sudarmadji dan Sularto (2007) yang menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat.

Menurut Susilawati (2016) menyatakan bahwa “suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar”. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga

semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya aset yang dimiliki daerah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, baik kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Ukuran pemerintah diukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas dalam Suhardjanto, dkk (2010: 4). Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016) serta Mustikarini, dan Fitriasari (2012) yaitu diproksikan dengan menggunakan total aset dalam satuan juta rupiah. “Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti

peningkatan kinerja.” *Size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan pendapat Sumarjo (2010) menyatakan bahwa “semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai cara untuk menilai ukuran organisasi juga dapat digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah, salah satunya dengan total kekayaan daerah. Daerah yang memiliki ukuran daerah yang lebih besar akan memiliki anggaran yang lebih besar pula dalam meningkatkan kemajuan masing masing daerah (Manik, 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai ukuran (*size*) pemerintah daerah.

D. Tinjauan Tentang *Intergovernmental Revenue*

Desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2006). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto *et al.*, 2010). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah (Minarsih, 2015).

Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu (Minarsih, 2015):

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Pada aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah ini Elmi (2002) dalam Minarsih (2015) mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Julitawati (2012) dalam Minarsih (2015) menyatakan bahwa, artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari DAU dan DAK.

Minarsih (2015) mengungkapkan bahwa, “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel”. Cahyat (2004) dalam Minarsih (2015) menyatakan bahwa, “Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal”.

Adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik (Sesotyningtyas, 2012). Jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut (Nugroho, 2014):

1. Bagian Daerah, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 persen bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk

daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

E. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut kamus umum bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*very poor*) dan termiskin (*poorest*). Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya *bargaining* (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya (Suryawati, 2005).

Kemiskinan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa pengertian. Menurut Sumodiningrat dalam Renggo (2017) mengklasifikasikan pengertian kemiskinan sekurang-kurangnya dalam lima kelas, yaitu kemiskinan absolute, kemiskinan relative, kemiskinan cultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara.

Lebih lanjut *World Bank* tahun 2011 memberikan kategori orang yang dikelompokkan miskin adalah orang yang per kapita pendapatannya kurang dari USD2 per hari. Artinya orang yang bersangkutan setiap harinya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari USD2 sehari. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dipegang oleh Pemerintah Indonesia, kemiskinan diukur dengan menghitung kebutuhan pangan seorang dalam sehari, diukur dengan satuan kalori, kemudian dikalikan dengan harga.

Kartasamita dalam Sartika dan Rumbia (2016) menambahkan pengertian kemiskinan selain dari kemiskinan yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan (kemiskinan absolute dan relative) dan kemiskinan berdasarkan pola waktu yaitu kemiskinan turun-temurun (*persistent poverty*), kemiskinan siklikal (*cyclical poverty*), kemiskinan musiman (*seasonal poverty*), kemiskinan sementara (*accidental poverty*), ia juga melihat kemiskinan yang dikaji berdasarkan penduduk dan potensi wilayah. Dari segi keadaan penduduk, penentuan penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Adapun kemiskinan dari potensi wilayah yaitu dengan menerapkan wilayah-wilayah atau desa-desa yang dikategorikan sebagai wilayah atau desa tertinggal.

Menurut Friedman dalam Suyanto (2013), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial yaitu; *pertama*, modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan dan kesehatan. *Kedua*, sumber keuangan seperti income dan kredit yang memadai. *Ketiga*, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. *Keempat*, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. *Kelima*, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2017). Menurut Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Tinggi rendahnya kemiskinan disuatu Negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai suatu Negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di Negara tersebut pasti akan tetap parah.

Demikian pula sebaliknya, semerata apapun suatu Negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Menurut Chambers dalam Huda (2015), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, dan kesehatan pendidikan yang dioerlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan daripihak luar.
4. Kemiskinan Struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan (Hidayat dkk, 2017).

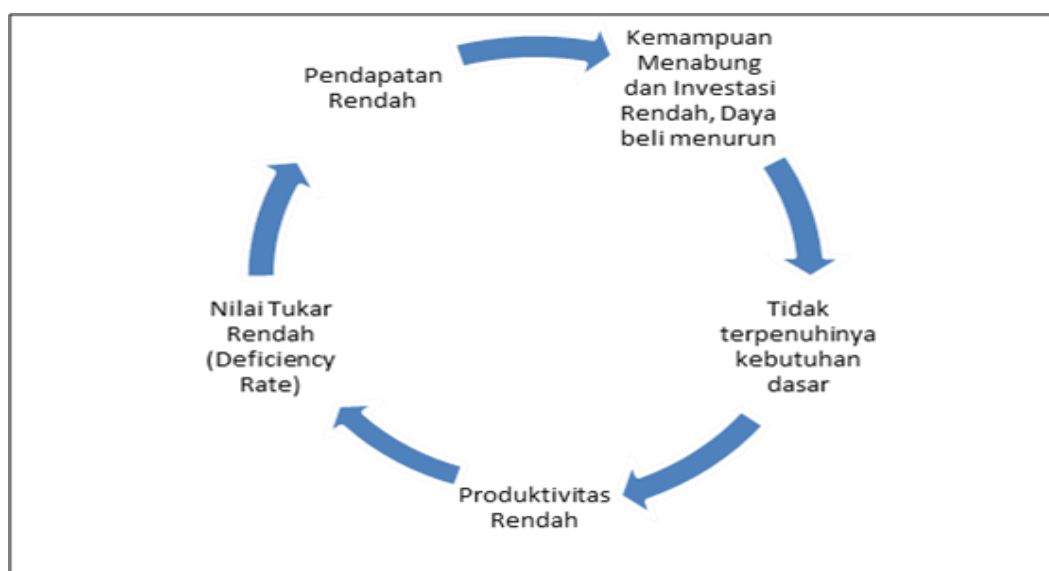
Menurut Shapr, *et al* dalam Kuncoro (2014) yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidakmampuan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin) (dalam Jonaidi, 2012).

Penyebab kemiskinan pada teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang menyatakan ada tiga penyebab utama terjadinya kemiskinan yaitu: *pertama*, adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber

daya manusia, yang tercermin dari rendahnya indeks pembangunan manusia, *kedua*, ketidaksempurnaan pasar, *ketiga*, kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran yang berakibat pada keterbelakangan.

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali di kenalkan oleh Ragnar Nurkse. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Arsyad, 2016). Berikut gambar teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) (Kuncoro, 2014):



Sumber: Kuncoro, 2006

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.

Menurut Suwadi (2014) Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Yang kedua yaitu kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu :

- a. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.
- b. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
- c. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

Menurut Suwadi (2014) menjelaskan tentang teori dari Lincoln Arsyad (2010) kemiskinan dapat dilihat atau diukur dari:

- a. Indikator Tingkat Konsumsi Beras

Mengukur berapa banyak tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, dengan rincian ada tiga kategori miskin yaitu sangat miskin, miskin dan nyaris miskin.

- b. Indikator Tingkat Pendapatan

Dalam pengukuran pendapatan di lihat dari pendapatan perkapita. Dan dapat di lihat dari garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin di ukur dari pengeluaran per hari satu dolar Amerika. Kalau ukuranya dua dolar per hari maka termasuk miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan dapat dilihat dengan cara menggunakan perhitungan *Head Count index*, adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Lembaga BPS dalam statistik Indonesia (2017) menjabarkan “ Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Todaro (2000),

menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

F. Hubungan Antar Variabel

1. Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam meningkatkan perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Hasil penelitian Ramayandi (2003) dan Manik (2013) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. *Intergovernmental Revenue* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Intergovernmental revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto dkk, 2010). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di

bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya dana bantuan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana perimbangan akan masuk ke dalam akun pendapatan daerah sehingga akan meningkatkan total penerimaan daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Semakin besar transfer dana dari pemerintah pusat, maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hasil penelitian Chandra dkk (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan ternyata berdampak buruk terhadap peningkatan ketimpangan antar daerah.

3. Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan

ekonomi maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan sehingga kemiskinan berkurang dan pertumbuhan ekonomi terus bertambah. Hasil penelitian Aryunah dkk (2015) dan Novriansyah (2018) memberikan hasil bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Tumpal Manik (2013)	Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi , <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Uji asumsi klasik 2. Nilai koefisien korelasi, koefisien regresi, koefisien jalur dengan residual 3. Analisis interpretasi melalui uji-F dan uji-t	Hasil interpretasi penelitian model jalur pertama menunjukkan bahwa yang berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pembangunan manusia adalah kemakmuran 41,2%; ukuran pemerintah daerah 76,7% dan kemiskinan penduduk -92,8%. Sedangkan model jalur kedua secara tidak langsung, tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan manusia. Secara simultan berpengaruh sebesar 86,6% terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Moh. Arif Novriansyah (2018)	Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo	Metode analisis regresi berganda dengan SPSS (<i>Statistical Program Service Solution</i>) versi 16.0	Pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Hal ini juga sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan regresi sederhana, dimana tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dari

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				probabilitas menghasilkan angka 0,019. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara variabel tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan (Variabel X1 dan X2) dan pertumbuhan ekonomi (Variabel Y) adalah signifikan
3	Marianus Manek (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Data diolah dengan menggunakan varian berbasis SEM yang disebut WarpPLS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.
4	Dodi Chandra (2017)	Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi	Analisis dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi	Hasil analisis diketahui bahwa: 1) rata-rata dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Jambi selama tahun 2001-2013 meningkat setiap tahunnya. 2) Dana perimbangan ternyata berdampak baik dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Namun, dana perimbangan juga berdampak negatif pada peningkatan ketimpangan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
5	Aryunah dkk (2015)	Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang	Uji kausalitas granger	antar daerah. Adanya hubungan searah antara kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta terdapat hubungan searah antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang
6	Endang Kusdiah Ningsih (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018	Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
7	Arief Ramayandi (2003)	Economic growth and Government Size in Indonesia : Some Lesson For the Local Authorities	Model koreksi kesalahan (ECM) digunakan untuk tujuan analisis	Ukuran pemerintah cenderung berdampak negatif pada pertumbuhan

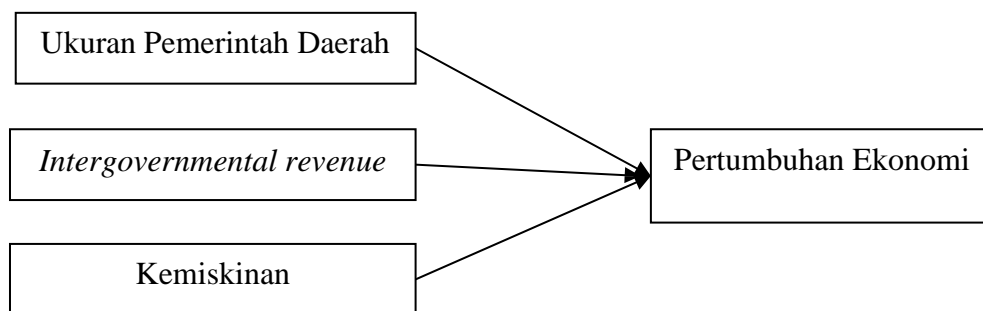
H. Kerangka Pemikiran

Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan sektor perekonomian suatu negara dalam jangka pendek dan jangka panjang, sebab melalui pengukuran nilai pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis prestasi maupun perkembangan perekonomian suatu negara ataupun wilayah dari suatu periode ke

periode berikutnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pemerintah daerah, Aziz (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam meningkatkan perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Selain ukuran pemerintah, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah *Intergovernmental Revenue* atau biasa dikenal dengan dana perimbangan, tujuan dari *intergovernmental revenue* mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu, kemiskinan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, hal ini jelas mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian.

Dari kajian teoritis yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

I. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, serta permasalahan dan tujuan penelitian, maka dugaan sementara dalam riset ini yaitu:

1. Diduga ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
2. Diduga *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
3. Diduga kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.
4. Diduga ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, sekaligus untuk menjawab pertanyaan terkait sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset (Sugiyono, 2015).

Data akan diolah menggunakan teknik data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga memberikan informasi observasi setiap subjek dalam sampel.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media perantara. Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2015-2019 serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 pemerintah daerah yang terdiri dari 2 (dua) pemerintah kota, dan 13 pemerintah kabupaten.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2016). Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan sebagai variabel independen.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat keadaan perekonomian di suatu wilayah. Kemampuan memproduksi dari sektor-sektor ekonomi yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun dan dinyatakan dalam persen. dalam penelitian ini digunakan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

2. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016) serta Mustikarini, dan Fitriasaki (2012) yaitu diproksikan dengan menggunakan total aset. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Data total Aset berasal dari Laporan Keuangan pada bagian Neraca yang terdiri dari kas, persediaan, investasi, kewajiban dan ekuitas yang akan dibagi dengan data APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pertimbangan pengukuran ini karena total aset dinilai lebih mewakili ukuran suatu pemerintah daerah.

$$\text{Ukuran pemerintah daerah} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{APBD Daerah}} \times 100$$

Sumber: Aziz (2016) & Mustikarini, dan Fitriasaki (2012)

3. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue di Indonesia dikenal dengan dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Menik (2013). Dana transfer pemerintah pusat merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat. *Intergovernmental Revenue* dengan diperoleh dari total dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam satuan juta rupiah.

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{dana perimbangan}}{\text{total pendapatan}} \times 100$$

Sumber: Menik (2013)

4. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam menggambarkan tingkat kemiskinan menggunakan *Head Count Index* (HCI) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

$$\text{Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Sumber: BPS (2019)

Tabel 3.1. Nama Variabel, Simbol, Periode Waktu, Satuan Pengukuran dan Sumber Data

Nama Variabel	Simbol	Periode Waktu	Satuan	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Tahunan	Persen	BPS
Ukuran Pemerintah Daerah	UPD	Tahunan	Persen	BPS
<i>Intergovernmental revenue</i>	IRV	Tahunan	Persen	BPS
Kemiskinan	POV	Tahunan	Persen	BPS

E. Model Penelitian

Model struktural yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung yaitu:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 UPD_{it} + \beta_2 IRV_{it} + \beta_3 POV_{it} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

PE : Pertumbuhan Ekonomi (persen)
 UPD : Ukuran Pemerintah Daerah (persen)
 IRV : *Intergovernmental revenue* (persen)

POV	: Kemiskinan (persen)
i	: Kabupaten/Kota Sampel
t	: data <i>time series</i>
ϵ_t	: <i>Error term</i>
β_0	: intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: koefisien regresi yang ditaksir

F. Metode Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Menurut Widarjono (2013) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*). Dalam melakukan analisis dan pengujian hipotesis digunakan alat bantu program komputer *EViews 9*. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel.

G. Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2013), ketika kita melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan atau negara, kita tidak hanya melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut dalam waktu yang bersamaan tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai unit waktu. Misalnya kita melakukan observasi terhadap suatu industri, maka kita tidak hanya akan mengevaluasi besarnya biaya, input, dan output terhadap beberapa tetangga perusahaan dalam satu kurun waktu, tetapi kita akan mengobservasi dalam berbagai kurun waktu. Gabungan dari berbagai unit observasi dan unit waktu

tersebut disebut data panel (*panel pooled data*). Tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square (PLS)*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Model persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$: Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien *slope*

ε_{it} : Residual (*error term*)

2. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Menurut Widarjono (2013), pendekatan yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam persamaan dikenal dengan model regresi *Fixed Effect Model*. Cara mengestimasi model adalah dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Perbedaan karakteristik perusahaan dalam

model ini hanya mengasumsikan intersep yang berubah antar individu dan tetap antar waktu, namun slope tetap antar perusahaan maupun antar waktu. Model estimasi ini juga disebut dengan *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*. Model pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1it} + \beta_5 D_{2it} + \dots + \beta_n D_{nit} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t
 X_{1it}, X_{2it} : Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t
 β_0 : Intersep
 β_1, β_2 : Koefisien *slope*
 D_{1it}, D_{2it} : Variabel dummy
 ε_{it} : Residual (*error term*)

3. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Pendekatan variabel dummy dalam *Fixed Effect Model* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi dengan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *Random Effect*. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Model dari *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + v_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan :

Y_{it}	: Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t
X_{1it}, X_{2it}	: Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t
β	: Intersep
β_1, β_2	: Koefisien <i>slope</i>
ν_{it}	: $\epsilon_{it} + \mu_i$

β_0 tidak lagi tetap atau non stokastik tetapi bersifat *random*, β adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan μ_i adalah variabel gangguan yang bersifat *random* yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu. Nama metode *Random Effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan ν_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh atau kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu. (Widarjono, 2013).

H. Penentuan Metode Estimasi

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi panel dilakukan dengan *Pooled Least Square* atau dengan *Fixed Effect Model* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Apabila nilai F-statistik lebih besar dari F-tabel maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*. Dan sebaliknya, apabila nilai F-statistik lebih kecil dari F-tabel maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Pooled Least Square* (Agus Widarjono, 2016). Sehingga hipotesis untuk Uji Chow sebagai berikut:

H_0 : F-statistik < F-tabel, H_0 diterima artinya model yang digunakan adalah

Pooled Least Square (PLS)

H_a : F-statistik > F-tabel, H_0 ditolak artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Uji Hausman didasarkan pada heterogenitas antar individu dan korelasinya dengan variabel bebas.

Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan *degree of freedom (df)* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect Model* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Square* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect Model* (Agus Widarjono, 2016). Sehingga hipotesis untuk Uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : Chi-Square statistik < Chi-Square tabel, H_0 diterima artinya model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

H_a : Chi-Square statistik > Chi-Square tabel, H_0 ditolak artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

3. Uji Lagrange Multiplier (L-M)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* lebih baik daripada metode *Pooled Least Square* dengan menguji metode *Random Effect Model* yang didasarkan pada nilai residual dari metode PLS. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar jumlah variabel bebas. Sehingga hipotesis untuk Uji *Lagrange Multiplier* sebagai berikut:

H_0 : LM-statistik < Chi-Square tabel, H_0 diterima artinya model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS)

H_a : LM-statistik > Chi-Square tabel, H_0 ditolak artinya model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

I. Pengujian Hipotesis

1. Uji t-Statistik

Pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi parsial dengan menggunakan uji t dengan tingkat keyakinan 95% apabila besarnya varians populasi tidak diketahui, sehingga pengujian hipotesisnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai statistiknya. Hipotesis yang dibentuk dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- H_{01} : ($\beta_1 = 0$): ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_{a1} : ($\beta_1 \neq 0$): ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_{02} : ($\beta_2 = 0$): *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

- $H_{\alpha 2}$: ($\beta_2 \neq 0$): *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H_{03} : ($\beta_3 = 0$): kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- $H_{\alpha 3}$: ($\beta_3 \neq 0$): kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Bila t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima atau H_a ditolak, berarti tiap-tiap variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak atau H_a diterima, berarti tiap-tiap variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F. Pada penelitian ini dalam melakukan uji F peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$ adapun langkah-langkah dalam uji F ini yaitu:

1. Membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0 \rightarrow$ Paling tidak salah satu variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0 \rightarrow$ Paling tidak salah satu variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependent secara bersama-sama.

2. Mencari nilai F-hitung dan nilai F-tabel pada tabel distribusi F. Nilai F-tabel berdasarkan besarnya α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1$) dan df untuk denominator ($n-k$). Adapun nilai F-hitung dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(n - k)}$$

3. Keputusan menolak atau menerima H_0 sebagai berikut:
 - a. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima
 - b. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak

J. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan secara keseluruhan terhadap variabel dependen serta pengaruhnya secara potensial dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 dikategorikan kedalam dua hal yaitu jika nilai R^2 semakin besar (mendekati nilai 1) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lebih besar. Begitu pula sebaliknya jika nilai R^2 semakin besar (mendekati 0) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Sehingga besaran nilai R^2 berada antara 0 sampai 1 atau $0 < R^2 < 1$ (Gujarati, 2010).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dengan menggunakan data panel melalui pendekatan *Pooled Least Square*, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian. Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil estimasi, variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung,
2. Berdasarkan hasil estimasi, variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung,
3. Berdasarkan hasil estimasi, variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
4. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji F dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

B. Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka disarankan kepada pemerintah

daerah agar melaksanakan pendataan aset daerah secara berkelanjutan, agar dapat membuat kebijakan penggunaan aset secara optimal sehingga dapat efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap penggunaan dana perimbangan, tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan dengan lebih memusatkan kepada perluasan kesempatan kerja melalui sosialisasi lowongan kerja secara merata dan mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah lebih mengutamakan sektor-sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah penduduk miskin seperti sektor pendidikan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Salman H. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retrisbusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aryunah, Ratih Inge., Luthfi, Agus., dan Hari, Siswoyo S., 2015. Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*. Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Astuti, R. R. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012. *Jurnal FE*. Yogyakarta : UNY.
- Aziz, Asmaul. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur). *EKSIS*, 11 (1), hal.86-101.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. Berbagai Edisi. *Data dan Informasi Kemiskinan*. Buku 1: Provinsi 1996-2017. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Berbagai Edisi*., BPS, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Balisacan, A.; E.M. Pernia; dan A. Asra., 2003. Revisiting Growth and Poverty in Indonesia: What do Subnational Data Show?, *Buletin of Indonesian Economic Studies Volume 39*, Issue 3. Desember 2003. Pages 329-351.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Basuki, Agus Tri. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berardi, N., and Marzo, F. 2015. The Elasticity of Poverty with Respect to Sectoral Growth in Africa. *The Review of Income and Wealth DOI*: 10.1111/roiw.12203.

- Bintang, Aria Bhaswara Mohammad; dan Woyanti, Nenik., 2018. Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015), *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 33 No. 1 Januari 2018.
- Boediono. 2008. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Chandra, Dodi., Hidayat, Syurya., Rosmeli, 2017, Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 12. No. 2, Juli -Desember 2017 ISSN: 2085-1960
- Chau Ngoc Ta, 2001. *Aspek-aspek perencanaan demografi*, Bhatara, Jakarta
- Daulay, Rahmawaty. 2010. Analisis Determinan Net Ekspor Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Sumatera Utara.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Franata, Jhony., Marwa, Taufiq., Yusuf, Komri. 2017. Factors Affecting Poverty Level In South Sumatra, Indonesia. *Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And Business*. SIJDEB, 1(1), 2017, 119-132.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi IV. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2010. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill
- Hakimudin, Dimas Rizal, 2010, Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2007. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker, 2012, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*, Jakarta: Salemba Empat
- Huda, N. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jhingan, M.L. 2010. "*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*", Rajawali Press, Jakarta.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press

- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1, No. 1, April 2012 hal.: 140- 164.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money* , New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Kuncahyono, Heru. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur”. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Kuncoro. Mudrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kusumawardhani, Indra .2012. “Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”.*Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 9, No. 1, Oktober 2012.
- LPEM FEUI. 2001. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Majid, M. Shabri Abd. 2014. Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1).
- Mankiw, N. Gregory.2007. *Makro Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Manik, T. 2013. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 9(2), 107-124.
- Manek, Marianus., dan Badrudin, Rudy. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Telaah Bisnis*. Vol. 17, No 2.
- Mardiasmo. 2018. Buku *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi
- Minarsih, R. A. 2015. Pengaruh Size, Wealth,Leverage, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*.Fakultas Universitas Negeri Semarang.

- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasisari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*: Banjarmasin.
- Ningsih, Endang Kusdiah., Dwi Eka Noviaty. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018”. *Journal of Economics and Business*.
- Novriansyah, Moh. Arif. 2018. Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, *Gorontalo Development Review (GOLDER)*, Vol. 1 No. 1 April 2018
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pramuji, Rafli Ahlam. 2020. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2018. *Jurnal Studi Ekonomi Pembangunan*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ramayandi, Arief. 2003. Economic growth and Government Size in Indonesia : Some Lesson For the Local Authorities. *Working Paper in Economics and Development Studies*. Padjadjaran University
- Rasyid, Al Harun. 2005. *Dasar-dasar statistika terapan*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Renggo, Yuniar Reny. 2017. Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 – 2015. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol.11 no.1 2017
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 2004. *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta PT. Media Edukasi.
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. 2016. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, Vol. 1(1), April 2016.
- Sigit Winarno, dan Sujana Ismaya. 2007. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika.

- Silastri, Novri. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.
- Stanly, W Alexander & Budianto. 2016. 'Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara'. *Jurnal* vol. 4. no. 4. hal. 844-851.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities*. *Journal Public Policy* January 2010
- Suhardjanto dan Yulianingtyas, R.2011.Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Jurnal*. Universitas Sebelas Maret.
- Sukirno, Sadono, 2010. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwadi, Widodo. 2014. *Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Ponorogo, Hlm 1-52.
- Suyanto, B. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing.
- Tambunan. T.TH. 2011. *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus TH. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Todaro, P Michael. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P Michael. dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonomi Pengantar dan Aplikasi*. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

-----, Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online] 2013. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ukuran. Diakses 20 Mei 2021